

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK

A. Gambaran Umum Objek/Subjek Penelitian

1. Batas Administrasi.



Gambar 4.1: Peta Wilayah Jawa Tengah

Jawa Tengah sebagai salah satu Provinsi di Jawa, letaknya diapit oleh dua Provinsi besar, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Tetaknya $5^{\circ}40'$ dan $8^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan antara $108^{\circ}30'$ dan $111^{\circ}30'$ Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 Km dan dari Utara ke Selatan 226 Km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa).

Secara administratif Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 Kabupaten dan 6 Kota, yaitu kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora, Boyolali,

Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo, Kota Magelang, Pekalongan, Salatiga, Semarang, Surakarta, dan Tegal.

Luas keseluruhan wilayah Jawa Tengah sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa (1,70% luas Indonesia). Luas yang ada terdiri dari 1,00 juta hektar (30,80%) lahan sawah dan 2,25 juta hektar (69,20%) bukan lahan sawah.

Kabupaten Cilacap merupakan kabupaten dengan wilayah terluas di Jawa tengah yaitu 2.138,51 km² (6,57%) dari total wilayah Jawa tengah, dan Kota Magelang merupakan wilayah terkecil di Jawa Tengah yaitu 18,12 km² (0,06%) dari total wilayah Jawa Tengah.

1. Kondisi Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Sedang dan Besar di Jawa Tengah.

Industri sedang dan besar memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah. Industri sedang dan besar yang menghasilkan output besar tentu membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak agar proses produksi berlangsung secara efisien. Kebutuhan dalam mengefisienkan proses produksi tersebut memungkinkan industri sedang dan besar untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak dipasar tenaga kerja.

Tabel 4.1
Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap pada Industri Sedang dan Besar
di Jawa Tengah Tahun 2010-2014

Tahun	Jumlah tenaga Kerja
2010	734.898
2011	732.031
2012	777.087
2013	838.351
2014	876.694

Sumber : BPS (data diolah)

Pada tabel 4.1 menjelaskan bahwa setiap tahun jumlah tenaga kerja yang terserap pada industri sedang dan besar di Jawa Tengah semakin meningkat. Dengan jumlah penyerapan tenaga kerja industri sedang dan besar di Jawa Tengah tersebut menunjukkan bahwa peran industri sedang dan besar dalam menurunkan tingkat pengangguran sangat besar.

2. Gambaran Umum Variabel Operasional.

a. Kondisi industri sedang dan besar di Jawa Tengah.

Untuk meningkatkan penyerapan jumlah tenaga kerja di sektor industri sedang dan besar maka jumlah industri sedang dan besar akan sangat berpengaruh. Penyerapan tenaga kerja tidak hanya terjadi jika jumlah unit industri mengalami kenaikan, saat terjadi penurunan jumlah

unit industri juga memungkinkan terjadinya kenaikan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dari tabel 4.2 di bawah ini.

Tabel 4.2

Jumlah Industri Sedang dan Besar di Jawa Tengah Tahun 2010-2014

Tahun	Jumlah Industri Sedang dan Besar
2010	3.887
2011	3.850
2012	3.736
2013	3.666
2014	3.851

Sumber: BPS (data diolah)

Pada tabel 4.2 jumlah data industri sedang dan besar di Jawa Tengah tahun 2010-2014. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa jumlah industri sedang dan besar di Jawa Tengah dari tahun 2010 hingga tahun 2013 mengalami penurunan dan mengalami kenaikan pada tahun 2014. Kenaikan jumlah industri sedang dan besar di Jawa Tengah pada tahun 2014 dikarenakan adanya kenaikan investasi. Hasil survei yang dilakukan oleh biro humas Jawa Tengah dalam Kajian Ekonomi Regional Jawa Tengah (2014) menyebutkan bahwa kondisi usaha di Jawa Tengah mengindikasikan investasi masih tinggi khususnya di subsektor industri tekstil.

b. Kondisi Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Tengah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator untuk mengukur suatu pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

Sektor industri merupakan salah satu sektor ekonomi yang ikut berperan dalam total hasil PDRB. Berikut ini merupakan PDRB menurut lapangan usaha di Jawa Tengah tahun 2010-2014.

Tabel 4.3

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Tengah (miliar rupiah), 2012-2014

Lapngan Usaha	2012	2013	2014
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	106.536,70	108.832,11	107.793,38
Pertambangan dan penggalian	13.745,87	14.594,16	15.542,65
Industri pengoahan	241.528,86	254.684,12	271.561,47
Pengadaan listrik dan gas	751,16	813,60	843,87
Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang	547,79	549,04	567,98
Konstruksi	70.034,62	73.465,92	76.681,88
Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	101.058,61	105.825,31	110.809,19
Transportasi dan perdagangan	20.818,47	22.760,15	24.802,18
Penyediaan akomodasi dan makan minum	20.871,60	21.812,57	23.464,64
Informasi dan komunikasi	24.690,22	26.663,58	30.130,16
Jasa keuangan dan asuransi	18.588,74	19.311,45	20.115,57
Real estat	11.934,42	12.853,22	13.776,86
Jasa perusahaan	2.087,13	2.340,12	2.534,62
Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib	20.373,58	20.912,83	21.075,65
Jasa pendidikan	22.760,88	24.930,59	27.466,22

Jasa kesehatan	4.959,38	5.312,61	5.907,51
Jasa lainnya	10.055,07	10.983,73	11.917,82

Sumber: BPS (data diolah)

Dari data PDRB di atas dasar lapangan kerja diatas, sektor industri pengolahan merupakan sektor yang memberi kontribusi terbesar dalam PDRB dari tahun 2012 hingga 2014, sektor kedua yang memberi kontribusi terbesar dalam PDRB adalah sektor perdagangan dan sektor ketiga yang memberi kontribusi terbesar dalam PDRB adalah sektor pertanian.

c. Kondisi Upah Minimum di Jawa Tengah.

Faktor utama yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah upah. Kenaikan tingkat upah akan menaikkan biaya produksi perusahaan yang pada akhirnya akan menaikkan harga barang. Kenaikan harga barang tersebut akan menyebabkan pembeli berkurang, hal ini membuat produksi berkurang dan pada akhirnya terjadi penurunan permintaan tenaga kerja. jika tingkat upah naik, maka perusahaan lebih suka untuk mengganti tenaga kerja dengan teknologi sehingga permintaan tenaga kerja menurun.

Upah minimum merupakan standar nilai terendah yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pegawainya sesuai dengan tingkat kebutuhan hidup minimum (KHL) yang berlaku di provinsi yang bersangkutan. Penetapan upah minimum ini bertujuan untuk menjaga daya beli penduduk akibat adanya kenaikan harga atau inflasi. Berikut

merupakan rata-rata upah minimum di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2014.

Tabel 4.4
Rata – rata Upah Minimum di Jawa Tengah
Tahun 2010 – 2014(rupiah)

Tahun	KHL	UMK
2010	800.581,5	708.973,55
2011	830.807,28	810.372,12
2012	864.387,1	877.852,72
2013	940.375,03	914.275,68
2014	1.77.793,30	1.066.603,43

Sumber: BPS (data diolah)

Dari tabel 4.4 diatas, dapat dilihat di Jawa Tengah dari tahun 2010 sampai 2014, nilai UMK selalu lebih rendah dari nilai KHL. Setiap tahunnya, UMK Jawa Tengah mengalami kenaikan rurang lebih sekitar 10%.Namun meski terjadi peningkatan, UMK Jawa Tengah masih lebih rendah dari pada KHL di Jawa Tengah.